



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
**UNIT KERJA** : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VIVI YULASWATI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3. NHK : 152767

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.185.000.000

1. Tanah Seluas 514 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m<sup>2</sup>/75 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m<sup>2</sup>/103 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.470.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 515 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 163.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, VESPA LX125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 140.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 32.000.000

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.738.815.306



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.258.815.306

## III. HUTANG

Rp. ----

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.258.815.306

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.